

Pelaksanaan Supervisi Kebijakan Kurikulum Merdeka Terhadap Kualitas Pendidikan Islam di MAN 1 Medan

Gilang Luthfie Dalimunthe¹, Ahmad Yudha Pratama², Sutan Rizki Rambe³,
Aulia Mei Sandrina⁴, Tengku Darmansah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: gilangluthfie@gmail.com¹, pratamahmadyudha@gmail.com²,
sutanrizki09@gmail.com³, aulia20201999@gmail.com⁴,
teng kudarmansah@uinsu.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana supervisi dalam penerapan Kurikulum Merdeka berpengaruh pada kualitas pendidikan Islam di MAN 1 Medan. Kurikulum Merdeka, yang berlandaskan KMA 347 Tahun 2022, menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penguatan karakter, penguasaan keterampilan abad ke-21, serta integrasi nilai-nilai Islam melalui Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (PPRA). Dengan pendekatan evaluatif deskriptif-kualitatif menggunakan Model CIPP, penelitian ini melibatkan Wakil Kepala Madrasah sebagai informan utama. Hasilnya menunjukkan bahwa supervisi di madrasah berjalan cukup terstruktur melalui tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi, melibatkan pimpinan dan guru senior sebagai evaluator. Dukungan supervisi ini memperkuat penerapan Kurikulum Merdeka, terlihat dari meningkatnya profesionalisme guru, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran berbasis proyek yang membantu siswa berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan memperkuat karakter Islami. Namun, masih ada hambatan seperti persepsi guru yang salah tentang supervisi dan tingginya beban administrasi pimpinan. Tantangan ini diatasi melalui pendekatan kekeluargaan, pelatihan rutin, dan pembelajaran antar-guru. Secara keseluruhan, supervisi akademik yang konsisten dan terencana menjadi faktor penting dalam menjaga mutu internal dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di MAN 1 Medan.

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Kurikulum Merdeka, Kualitas Pendidikan Islam, PPRA, Model CIPP

ABSTRACT

This study examines how supervision in the implementation of the Independent Curriculum (Curriculum Merdeka) affects the quality of Islamic education at MAN 1 Medan. The Independent Curriculum, based on KMA 347 of 2022, emphasizes student-centered learning, character building, mastery of 21st-century skills, and the integration of Islamic values through the Rahmatan Lil Alamin Student Profile (PPRA). Using a descriptive-qualitative evaluative approach using the CIPP Model, this study involved the Deputy Principal as the key informant. The results indicate that supervision at the madrasah is quite structured through pre-observation, observation, and post-observation stages, involving principals and senior teachers as evaluators. This supervisory support strengthens the implementation of the Independent Curriculum, as evidenced by increased teacher professionalism, the implementation of differentiated learning, and project-based learning that fosters critical

thinking, creativity, collaboration, and fosters Islamic character. However, obstacles remain, such as teachers' misperceptions about supervision and the high administrative burden on principals. These challenges are addressed through a family-like approach, regular training, and teacher-to-teacher learning. Overall, consistent and planned academic supervision is a crucial factor in maintaining internal quality and improving the quality of Islamic education at MAN 1 Medan.

Keywords: Academic Supervision, Independent Curriculum, Quality of Islamic Education, PPRA, CIPP Model

PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk pada madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Melalui KMA 347 Tahun 2022, madrasah diberikan pedoman implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi abad 21. Kebijakan ini menuntut madrasah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pendekatan pembelajaran, penyusunan perangkat ajar, hingga pelaksanaan asesmen yang lebih fleksibel dan autentik.

Dalam konteks madrasah, implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga kualitas pendidikan Islam yang mencakup aspek spiritual, moral, dan akhlak peserta didik. Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang terarah agar penerapan kurikulum sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Supervisi akademik menjadi instrumen kunci untuk memastikan kebijakan kurikulum dapat diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran yang efektif, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islami.

MAN 1 Medan sebagai salah satu madrasah negeri besar di Sumatera Utara telah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui berbagai strategi, mulai dari perencanaan kurikulum, pelatihan guru, hingga pembentukan tim supervisi internal. Namun, implementasi kebijakan tidak terlepas dari tantangan, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia, pemahaman guru terhadap kurikulum, serta keterbatasan waktu dan administrasi dalam proses supervisi. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi yang sistematis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan supervisi dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan Islam di madrasah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme supervisi di MAN 1 Medan dijalankan sebagai bentuk evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka, bagaimana pengaruh kurikulum terhadap pembentukan karakter religius peserta didik, serta apa saja hambatan kebijakan yang muncul beserta strategi penyelesaiannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap penguatan kebijakan kurikulum dan model supervisi pendidikan di lingkungan madrasah.

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan tujuan, dampak, dan tingkat kemanfaatannya kepada masyarakat. Secara konseptual, evaluasi kebijakan menjadi bagian esensial dalam siklus kebijakan yang terdiri atas tahap formulasi, implementasi, dan terminasi. Evaluasi berfungsi memberikan informasi yang akuntabel kepada pembuat kebijakan mengenai capaian kebijakan, kekurangan pelaksanaan, serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam perbaikan dan

penyusunan kebijakan berikutnya. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan tidak hanya implementatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap perubahan sosial dan peningkatan layanan publik (Anirowati et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan, evaluasi kebijakan digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pendidikan mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperbaiki sistem kelembagaan, dan memperkuat capaian peserta didik. Menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan tidak dapat hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi harus menelaah proses, aspek perencanaan, serta dukungan input, karena pendidikan bersifat multidimensional dan melibatkan interaksi kompleks antara sekolah, guru, peserta didik, serta lingkungan belajar (Riawan et al., 2025). Dengan demikian, evaluasi kebijakan pendidikan memberikan gambaran yang utuh terkait efektivitas implementasi kebijakan.

Salah satu pendekatan evaluasi kebijakan yang banyak diterapkan dalam pendidikan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan menjadi dasar evaluasi keputusan berbasis bukti. Model CIPP dianggap komprehensif karena dapat mengukur kebijakan secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan penerapan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, hingga hasil akhir. Menjelaskan bahwa model CIPP memungkinkan evaluator melakukan evaluasi secara progresif, sehingga kebijakan dapat diperbaiki selama pelaksanaan, bukan hanya setelah program selesai (Sulkifli et al., 2024). Evaluasi konteks (context) menelaah latar belakang dan rasionalitas kebijakan, evaluasi input menilai kelayakan perencanaan, sumber daya, serta strategi pelaksanaan, evaluasi proses mengawasi konsistensi implementasi dengan pedoman kebijakan; sedangkan evaluasi produk menganalisis efektivitas capaian dan dampak kebijakan.

Penggunaan model CIPP dalam pendidikan juga dinilai adaptif terhadap karakteristik lembaga pendidikan. Studi meta-analisis yang dilakukan oleh Yusuf, Rustam, dan Andriani (2024) menunjukkan bahwa model CIPP paling banyak digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan kebijakan kurikulum dibandingkan dengan model Stake atau Scriven, karena memberikan gambaran longitudinal serta rekomendasi perbaikan kebijakan secara langsung (Yusuf et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan tidak boleh hanya bersifat retrospektif, tetapi harus bersifat formatif, yaitu memberikan umpan balik selama pelaksanaan kebijakan berlangsung.

Lebih lanjut, beberapa studi empiris memberikan bukti bahwa CIPP efektif digunakan dalam evaluasi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Misalnya, penelitian Syam, Mukhdlor, dan Syahri (2024) menemukan bahwa penerapan model CIPP membantu sekolah memetakan kesenjangan antara regulasi kurikulum dan kesiapan institusi, terutama terkait penyediaan input berupa pelatihan guru dan fasilitas sekolah (Syam et al., 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan yang berorientasi proses dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Kerangka evaluasi kebijakan publik berbasis model CIPP memberikan dasar epistemologis dan metodologis untuk menganalisis suatu kebijakan secara komprehensif. Evaluasi bukan hanya memeriksa seberapa jauh kebijakan menghasilkan output, tetapi juga menilai kesiapan sistem, kecukupan sumber daya, kualitas pelaksanaan, serta dampak kebijakan bagi sasaran. Evaluasi kebijakan dengan pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan, terutama dalam konteks reformasi kurikulum, penguatan karakter peserta didik, dan peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan.

B. Kurikulum Merdeka sebagai Kebijakan Pendidikan Islam

1) Tujuan Umum Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan konteks lokal masing-masing sekolah atau madrasah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi pembelajaran, serta daya saing peserta didik di era abad 21. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembentukan karakter peserta didik tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek moral, sosial, emosional, dan spiritual. Pembelajaran di bawah Kurikulum Merdeka diarahkan pada pengembangan kompetensi abad 21 dan karakter kebangsaan serta kemanusiaan. Untuk madrasah atau pendidikan Islam, tujuan tersebut dipadukan dengan nilai-nilai agama sehingga Kurikulum Merdeka tidak hanya sekadar modernisasi kurikulum umum, tetapi juga penguatan identitas keislaman dan karakter rahmatan lil alamin.

2) Pedoman pada KMA 347 Tahun 2022

Sebagai dasar regulatif penerapan Kurikulum Merdeka pada madrasah, KMA 347 Tahun 2022 diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). KMA ini memberikan pedoman untuk madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan dengan Kurikulum Merdeka, termasuk RA (Raudhatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs, MA, dan MAK. Ruang lingkup KMA 347 meliputi: standar kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, implementasi kurikulum di madrasah, pembelajaran dan asesmen, penguatan karakter melalui proyek (termasuk P5 dan PPRA), kurikulum operasional madrasah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, sosialisasi serta pendampingan implementasi. Adanya pedoman ini memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan dengan kekhasan pendidikan Islam terutama dalam mata pelajaran agama dan bahasa Arab sekaligus tetap mengikuti standar umum Kurikulum Merdeka bagi mapel umum.

3) Definisi PPRA dan P5

P5 adalah kerangka karakter bangsa yang dituju melalui Kurikulum Merdeka. Karakter-karakter inti P5 meliputi nilai-nilai seperti keimanan/takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, gotong royong, kemandirian, kebhinekaan global, berpikir kritis, dan kreatifitas. P5 dirancang untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter kebangsaan dan kemanusiaan. Bagi madrasah/pendidikan Islam, P5 diperluas atau diperkaya dengan PPRA yaitu profil siswa yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti akhlak rahmatan lil 'alamin, moderasi beragama, toleransi, keadaban (ta'addub), keteladanan (qudwah), musyawarah (syura), dan nilai-nilai islami lainnya. Hal ini menjadikan kurikulum tidak hanya sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter dan moral berbasis Islam. Menurut penelitian implementasi di madrasah, P5 dan PPRA menjadi komponen wajib dalam Kurikulum Merdeka bagi madrasah artinya setiap madrasah harus menyelenggarakan proyek-proyek karakter/kehidupan (project-based learning) yang mencerminkan nilai P5 dan PPRA.

4) Kaitan antara P5, PPRA, dan Kurikulum Merdeka

Integrasi P5 dan PPRA ke dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya bersifat tambahan melainkan bagian integral dari struktur dan tujuan kurikulum di

madrasah. Kurikulum Merdeka menjadi kendaraan formal untuk mewujudkan profil ideal pelajar bangsa (P5) sekaligus profil pelajar berkeislaman yang moderat dan rahmatan lil 'alamin (PPRA). Proyek berbasis karakter (character-based/faith & values-based projects) menjadi metode utama dalam implementasinya menggantikan orientasi semata pada penguasaan materi akademik atau hafalan.

Madrasah memiliki otonomi dalam merancang kurikulum operasional dan proyek karakter sesuai identitas, konteks lokal, dan nilai keislaman sehingga pendidikan menjadi relevan secara lokal dan kontekstual. Asesmen dan evaluasi pendidikan tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga aspek karakter, spiritual, moral, dan sosial sehingga hasil pendidikan mencerminkan pembentukan manusia utuh (holistik). Penelitian pada madrasah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa ketika madrasah mengadopsi P5 dan PPRA secara konsekuen, hasilnya adalah peningkatan karakter kebangsaan, toleransi, kerja sama, kemandirian, serta sikap religius dan akhlak mulia di antara peserta didik.

C. Konsep Kualitas Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam, mengalami masa sulit. Ini terutama terlihat dari posisinya dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum. Madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua dalam sistem pendidikan nasional. Namun, madrasah memiliki status yang sama dengan lembaga pendidikan umum sejak Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat. Madrasah adalah sekolah umum yang didasarkan pada agama Islam. Sekarang Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah setara dengan SMA. Tamatan Madrasah Ibtidaiyah dapat melanjutkan ke SMP, dan tamatan Madrasah Tsanawiyah dapat melanjutkan ke SMA, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, madrasah adalah sekolah umum plus. Untuk meningkatkan mutu atau kualitasnya, madrasah memiliki sumber daya yang lebih baik atau lebih maju dibandingkan dengan sekolah umum.

Secara umum di dalam pendidikan, termasuk pendidikan umum maupun agama, kualitas yang dimaksudkan adalah konsep relatif, terutama dalam hal kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan terdiri dari dua komponen: internal dan eksternal. Pendidikan berkualitas terjadi ketika:

1. Pelanggan internal (guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah) mengalami peningkatan fisik dan mental. Antara lain, mereka mendapatkan imbalan secara fisik dalam bentuk uang, sementara imbalan secara pikiran adalah kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat, dan kreatifitas mereka;
2. Pelanggan eksternal, meliputi:
 - a) Eksternal primer (para siswa). Menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, integritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya.
 - b) Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahaan dalam hal menjalankan tugastugas dan pekerjaan yang diberikan.

- c) Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Danim & Sudarwan, 2004).

Murtadho juga menjelaskan bahwa mutu atau kualitas mengacu pada tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya), baik barang maupun jasa, baik yang *tangible* (berbentuk fisik) maupun *intangible* (tak berbentuk fisik). Pengertian mutu dalam pendidikan mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas mencakup berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi menurut kemampuan guru), sarana sekolah atau madrasah, dukungan administrasi, serta sarana dan sumber daya tambahan (Murtadho & Ali, 2012).

Kualitas dalam konteks madrasah memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar prestasi akademik siswa. kualitas ideal sebuah madrasah diukur dari keberhasilannya dalam mengintegrasikan tiga pilar utama: akademik, akhlak/moral, dan spiritual siswa (Mulyasa, 2011). Kualitas pendidikan di madrasah secara fundamental berpusat pada pembentukan insan kamil (manusia sempurna) yang tidak hanya cerdas secara intelektual (IQ), tetapi juga matang secara emosional dan spiritual (EQ dan SQ). Secara spesifik, kualitas di madrasah mencakup hal-hal berikut:

1. Kualitas Akademik. Ini adalah dimensi yang umum, di mana madrasah harus mampu menghasilkan lulusan dengan pemahaman ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama yang mumpuni, ditunjukkan melalui nilai ujian dan kemampuan analitis.
2. Kualitas Akhlak dan Adab. Dimensi ini sering menjadi pembeda utama madrasah. Kualitas diukur dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang diwujudkan melalui akhlak mulia (seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati) dan adab yang baik (tata krama terhadap guru, orang tua, dan sesama). Jurnal-jurnal pendidikan Islam menekankan bahwa keberhasilan madrasah dalam menanamkan karakter ini adalah indikator kualitas yang krusial.
3. Kualitas Spiritual. Aspek ini berkaitan dengan kedalaman keimanan dan ketakwaan siswa. Madrasah yang berkualitas mampu membimbing siswa untuk menjalankan ibadah dengan kesadaran penuh (*khusyuk*), memiliki orientasi hidup ukhrawi, dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Kualitas spiritual ini mencerminkan sejauh mana madrasah telah berfungsi sebagai lembaga dakwah dan tarbiyah (pembinaan).

Oleh karena itu, kualitas madrasah diartikan sebagai sistem pendidikan yang secara simultan menghasilkan lulusan yang kompeten secara intelektual (*tafaquh fiddin* dan ilmu umum), memiliki karakter mulia (*akhlakul karimah*), dan kematangan spiritual (*kualitas ibadah*), memastikan bahwa output pendidikan sejalan dengan visi dan misi pendidikan Islam yang holistik.

D. Konsep Dasar Supervisi sebagai Alat Evaluasi

Menurut Piet (2008), supervisi berasal dari kata bahasa Inggris *vision* dan *super*.

Supervisi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk membantu guru, karyawan, dan anggota staf lainnya di sekolah melakukan tugas mereka dengan cara yang efisien dan menghasilkan hasil yang baik (Sahertian, 2008).

Menurut Maullang (2005), supervisi adalah proses menilai dan mengoreksi pekerjaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan rencana awal (Maullang, 2005). Supervisi juga dapat didefinisikan sebagai layanan yang diberikan kepada guru agar mereka menjadi profesional dan dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas mereka dengan baik terhadap siswa mereka (Thaib, 2005).

Supervisor adalah orang yang melakukan tugas supervisi (Maryono, 2011). Supervisor tidak hanya mengawasi guru dan staf lainnya, tetapi juga mengawasi apakah pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan. Supervisor juga menawarkan solusi dan mencari cara secara bersama untuk memperbaiki pekerjaan mereka secara lebih baik dan sesuai dengan persyaratan. Supervisi pendidikan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan bantuan kepada guru untuk memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah, serta memberikan bantuan kepada guru untuk tidak hanya berfokus pada bidang studinya tetapi juga mengetahui tujuan akhir dari pendidikan.
- 2) Membantu guru dalam memahami siswanya dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
- 3) Membantu guru menjadi pemimpin yang baik di masa depan yang dapat bekerjasama dengan banyak orang.
- 4) Membantu menemukan keunggulan guru dan memberikan tanggung jawab kepada mereka sesuai kemampuan mereka tanpa mengkritik kekurangan mereka.
- 5) Memberikan motivasi kepada guru untuk menjadi lebih baik saat berbicara di depan siswanya.
- 6) Memberikan pengetahuan kepada guru baru tentang tugas yang akan mereka lakukan agar mereka dapat melakukannya dengan baik.
- 7) Membantu guru menemukan masalah dan kesulitan siswa dan menemukan solusinya.

Arikunto (2004) membagi tujuan supervisi menjadi tiga kategori:

- 1) Supervisi Akademik. Supervisi akademik lebih menekankan masalah akademik atau masalah pembelajaran dan membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran mereka.
- 2) Supervisi Administrasi. Supervisi administrasi lebih cenderung mengarah ke administrasi untuk membantu terlaksana pembelajaran dengan baik.
- 3) Supervisi Organisasi. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan reputasi sekolah, sehingga meningkatkan kualitas sekolah (Arikunto & Suharsimi, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Medan, salah satu madrasah negeri besar di Sumatera Utara yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana proses supervisi dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penerapan kurikulum tersebut, bagaimana kurikulum ini berpengaruh pada pembentukan karakter religius peserta didik, serta hambatan-hambatan kebijakan yang muncul dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Secara desain, penelitian ini bersifat evaluatif dan deskriptif-kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara rinci mekanisme supervisi serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan Islam di madrasah. Informan utama dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala Madrasah.

Pengumpulan data dilakukan terutama melalui wawancara. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan alur supervisi, tantangan yang ditemui, strategi penyelesaiannya, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar mengandalkan data kualitatif dan informasi langsung dari lapangan, terutama untuk memahami secara mendalam bagaimana supervisi dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Supervisi terhadap Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka di MAN 1 Medan dimulai dengan perencanaan yang terstruktur. Tahap awalnya meliputi pembentukan tim pengembangan kurikulum, pelatihan bagi para guru, serta rapat untuk meninjau kembali KMA 347 Tahun 2022 merupakan pedoman penerapan kurikulum merdeka di madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sudah memiliki kesiapan. Rencana yang sudah dibuat kemudian dilaksanakan di lapangan. Melalui supervisi, sekolah memastikan bahwa dokumen perencanaan seperti modul ajar benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar. Supervisi berfungsi sebagai evaluasi proses untuk mengecek apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang dibuat.

Mekanisme supervisi kurikulum di MAN 1 Medan dimulai dari tahap perencanaan melalui musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dalam forum ini, wakil kepala madrasah memimpin diskusi untuk menentukan jadwal serta guru-guru yang akan disupervisi. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam surat keputusan (SK) resmi sebagai dasar pelaksanaan supervisi. Setelah itu, madrasah menyusun jadwal supervisi dengan merata, sehingga setiap mata pelajaran di setiap kelas mendapatkan supervisi minimal satu kali. Perencanaan yang teratur ini bertujuan memastikan setiap guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.

Pada tahap pelaksanaan, supervisi di MAN 1 Medan dilakukan oleh kepala madrasah, wakil kepala madrasah, MGMP, serta guru senior. Guru senior dilibatkan karena mereka memiliki pengalaman yang dapat membantu guru lain meningkatkan metode mengajar. Pelaksanaan supervisi biasanya dilakukan melalui kunjungan kelas. Supervisi mencakup observasi terhadap metode mengajar, cara mengevaluasi siswa, serta penggunaan bahan ajar. Setelah observasi selesai, supervisor dan guru berdiskusi untuk memberikan umpan balik yang bersifat membangun. Melalui proses ini, supervisi tidak hanya menjadi alat pengawasan, tapi juga sarana pembinaan yang membantu guru memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Mekanisme supervisi yang diterapkan secara terstruktur ini menunjukkan bahwa MAN 1 Medan sudah memiliki sistem pengendalian mutu internal yang baik. Dengan adanya pengawasan yang jelas dan teratur, sekolah dapat memastikan bahwa penerapan kurikulum merdeka berjalan sesuai standar dan tetap berada pada jalur yang di harapkan.

Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga tahap supervisi, yaitu pra observasi, observasi dan pasca observasi yang menunjukkan bahwa MAN 1 Medan bukan hanya menjalankan kurikulum merdeka, tetapi juga mampu membangun sistem evaluasi proses yang rapi melalui supervisi. Adanya supervisi yang terstruktur ini menjadi bukti bahwa kebijakan kurikulum dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan dalam KMA 347 tahun 2022. Kebijakan tersebut telah berhasil di terapkan dalam bentuk manajemen mutu yang jeas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tantangan Kebijakan dalam mengintegrasikan Kurikulum Merdeka serta Strategi Madrasah dalam Menghadapi tantangan

Pelaksanaan supervisi di madrasah sering terhambat oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Walaupun kurikulum merdeka di MAN 1 Medan sudah berjalan cukup baik, pada implementasinya ditemukan beberapa tantangan pada aspek input dan context. Masalah-masalah tersebut muncul karena tuntutan kurikulum baru tidak sepenuhnya seimbang dengan kemampuan dan kondisi nyata di sekolah.

Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman guru tentang makna supervisi. Banyak guru masih menganggap supervisi sebagai bentuk pengawasan yang negatif. Sikap ini membuat mereka enggan bekerja sama, sehingga proses pembinaan tidak berjalan maksimal. Beban administrasi kepala madrasah yang sangat besar juga menjadi masalah. Banyaknya tugas manajerial membuat supervisi sulit dilakukan secara rutin dan optimal. Ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka masih menambah pekerjaan baru yang belum menyatu dengan sistem yang ada, sehingga bisa mengurangi fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Situasi ini menunjukkan bahwa ada jarak kebijakan top-down yaitu kurikulum merdeka yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas bottom-up yaitu operasional madrasah. Karena itu, MAN 1 Medan membuat strategi sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi nyata, misalnya menggunakan pendekatan kekeluargaan saat menindaklanjuti hasil supervisi. Cara ini menjadi bentuk penyesuaian kebijakan dari bawah sebagai langkah kreatif pihak madrasah untuk mengatasi penolakan guru serta keterbatasan waktu. Tujuan supervisi adalah meningkatkan kualitas mengajar dan tetap bisa dicapai meskipun ada berbagai keterbatasan dalam kebijakan. Masalah lain yang muncul adalah fasilitas dan sarana supervisi yang belum memadai. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, madrasah menerapkan beberapa strategi:

1. Mengadakan pelatihan rutin agar guru lebih siap menerapkan kurikulum baru. Pendekatan peer learning juga digunakan, sehingga guru bisa saling berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran.
2. Memperkuat kerja sama antara supervisor dan guru, baik lewat kegiatan formal maupun informal. Semua pihak yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, hingga staf dilibatkan agar pelaksanaan kurikulum lebih efektif.
3. Memberikan pelatihan tambahan bagi kepala madrasah dan pengawas agar lebih memahami metode supervisi modern dan isi materi pelajaran.
4. Memberikan penghargaan kepada guru yang menunjukkan peningkatan kualitas melalui supervisi, sehingga tercipta budaya saling menghargai di lingkungan madrasah.

C. Dampak Kurikulum Merdeka terhadap kualitas Pendidikan Islam

Kualitas pendidikan Islam di madrasah tidak hanya dinilai dari nilai akademik, tetapi juga dari keberhasilan madrasah dalam membentuk karakter religius dan nilai-nilai Islami sesuai dengan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (PPRA). Ditemukan bahwa supervisi yang dilakukan dengan baik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi yang terstruktur membantu guru mengembangkan profesionalisme serta mendorong penggunaan metode mengajar yang lebih beragam dan kreatif. Ketika guru menerapkan metode yang inovatif, kualitas pengalaman belajar siswa pun meningkat.

Impelementasi kurikulum merdeka menegaskan bahwa kurikulum ini bertujuan mengembangkan kreativitas, perasaan, dan kemauan peserta didik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter pancasila. Di madrasah, nilai-nilai ini

harus dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Pelaksanaan kurikulum merdeka di MAN 1 Medan terlihat efektif melalui beberapa hal:

1. Pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyesuaikan cara mengajar, materi, dan tempo belajar sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan tiap siswa. Pendekatan ini membantu setiap siswa berkembang sesuai potensinya, sejalan dengan ajaran Islam tentang penghargaan terhadap potensi individu, yaitu dalam firman Allah Swt.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S Al-Isra:84)

2. Pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum merdeka menekankan aktivitas berbasis proyek (P5/PPRA). Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama.
3. Peningkatan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum merdeka di MAN 1 Medan secara umum meningkatkan kualitas pendidikan. Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, terlihat dari meningkatnya pemahaman mereka terhadap materi dan keterlibatan aktif dalam kelas. Peningkatan ini juga didukung oleh pelaksanaan supervisi yang efektif.

Jadi, kebijakan pengawasan mutu melalui supervisi telah berhasil mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terutama dalam pembentukan karakter siswa. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan administratif yang perlu diperbaiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam, supervisi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Medan berjalan terstruktur dan sesuai pedoman KMA 347/2022. Supervisi dilakukan melalui tiga tahap pra-observasi, observasi kelas, dan pasca-observasi serta melibatkan kepala madrasah, wakil, MGMP, dan guru senior untuk memastikan perencanaan dan praktik pembelajaran berjalan sesuai kebijakan. Pelaksanaan supervisi ini terbukti memberi dampak positif pada kualitas pendidikan Islam, terutama dalam aspek akademik, akhlak, dan spiritual siswa. Hal tersebut terlihat dari semakin kuatnya praktik pembelajaran berdiferensiasi dan proyek karakter (P5/PPRA) yang membantu siswa berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius. Meski ditemukan tantangan seperti kurangnya pemahaman guru dan beratnya beban administrasi pimpinan madrasah, MAN 1 Medan mampu mengatasinya melalui pendekatan kekeluargaan, pelatihan rutin, dan pembelajaran sesama guru. Secara keseluruhan, supervisi akademik yang terencana dan berkelanjutan menjadi alat penting dalam menjaga mutu internal serta memastikan Kurikulum Merdeka benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan Islam di MAN 1 Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anirowati, L., Rahma, S., & Komariah, N. (2023). Model-model Evaluasi Pendidikan. *Indonesian Journal of Social Science and Education*, 1(2), 45–46.
- Arikunto, & Suharsimi. (2004). *Dasar-dasar Supervisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, & Sudarwan. (2004). *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manullang. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maryono. (2011). *Dasar-dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Mutu Pendidikan: mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing*. Bandung: Rosda Karya.
- Murtadho, & Ali. (2012). Memperkokoh Kualitas Pendidikan Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Terpadu (TQM). *Forum Tarbiyah*, 10(1), 91–112.
- Riawan, I. M., Citariani, N., & Lokasanti, I. . (2025). Efektivitas Model Evaluasi CIPP dalam Program Pendidikan: Kajian Literatur Sistematis. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 108–115.
- Sahertian, P. (2008). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulkifli, Nade, E., Khumairah, E. S., & Riska. (2024). Pendekatan CIPP dalam Evaluasi Program Pendidikan: Tinjauan Literatur pada Program Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 136–143.
- Syam, A., Mukhdlor, M, & Syahri, M. (2024). Evaluasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP pada Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(4), 112–120.
- Thaib, D. (2005). *Standar Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Depag RI.
- Yusuf, S., Rustam, & Andriani, T. (2024). Meta Analisis Model Evaluasi Kurikulum (CIPP, Stake, Scriven) untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Tawadhu*, 12(1), 88–99.